

DAFTAR PUSTAKA

- Fiqi, K. (Juni, 2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2*, 2097-2100.
- Fitriya. (2023, Februari 28). *Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Jenis, Tarif, Cara Menghitung*. Retrieved from Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20ketentuan%20tarif%20pajak,22%25%20mulai%20Tahun%20Pajak%202022.>
- Fitriya. (2024, April 15). *Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT*. Retrieved from Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/batas-waktu-pembayaran-pajak-badan/>
- FlazzTax. (2022, Januari 31). *Ketahui Mekanisme PPh Pasal 25 Sebagai Angsuran Pajak*. Retrieved from Flazztax.com: <https://flazztax.com/2022/01/31/kenali-mekanisme-pph-pasal-25-sebagai-angsuran-pajak/>
- Galuh. (2022, Mei 01). *"Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Mei 2022"*. Retrieved from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/simak-di-sini-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-mei-2022-38877>
- Hana, O. D. (2021, Oktober 13). *UU HPP Turunkan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak, Ini Perinciannya*. Retrieved from BIsnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211013/259/1453957/uu-hpp-turunkan-sanksi-administratif-bagi-wajib-pajak-ini-perinciannya>
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN EDISI 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Maxuel, A. P. (2021). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM E-COMMERCE. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol. 16 No. 1* , 24-26.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983>

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan No 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2a42c83b-68d0-47b5-9e37-91d4eb8b2499>

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ/2017 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN P*. Retrieved from https://www.pajakku.com/tax-guide/11515/SE_DIRJEN_PJK/SE%20-%2030/PJ/2017

Pemerintah Republik Indonesia. (2021, Oktober). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Pemerintah Republik Indonesia. (2022, Mei). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 23/KM.10/2022 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2022 Sampai Dengan 31 Mei 2022*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/simak-di-sini-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-mei-2022-38877>

Sharah. Vani, T. (2023). PENGARUH KERINGANAN SANKSI ADMINISTRASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnalku Volume 3 No.2* , 174-178.